

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaannya yang mendukung penelitian ini:

1. **Dominikus Octavianto Kresno Widagdo Anis Chariri (2014)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan *non financial* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan (*performance*) yang diukur dengan *Earning Per Share* (EPS). Variabel *performance* ini diukur secara kuantitatif dengan menghitung jumlah deviden yang dibagikan per lembar saham. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, independensi komite audit, independensi dewan komisaris, kepemilikan manajerial perusahaan, jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah rapat komite audit. Objek penelitian ini menggunakan perusahaan *non financial* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 85 perusahaan sebagai sampelnya. Metode analisisnya diuji menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran dewan

komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, kemudian independensi komite audit, independensi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Persamaan :

1. Variabel dependennya adalah kinerja keuangan;
2. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perbedaan :

1. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *non financial* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012, sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mempublikasikan laporan keuangan (*annual report*) dan laporan *Good Corporate Governance* secara berturut-turut dari tahun 2008 –2013;
2. Penelitian terdahulu pengukuran kinerjanya menggunakan *Earning Per Share* (EPS), sedangkan penelitian sekarang pengukuran kinerjanya menggunakan *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE), dan variabel independen dalam penelitian terdahulu adalah ukuran dewan komisaris, independensi komite audit, independensi dewan komisaris, kepemilikan manajerial perusahaan, jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah rapat komite audit, sedangkan penelitian sekarang menggunakan sebelas faktor penilaian atau indikator yang sesuai dengan Surat Edaran

kepada semua Bank Umum Konvensional di Indonesia No.15/15/DNDP pada tanggal 29 April 2013 yang ada pada penilaian sendiri (*self assessment*).

2. Eni Susanti dan Djoko Sudantoko (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Variabel dependen penelitian ini menggunakan kinerja keuangan yang diproksi dengan *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Earning Per Share* (EPS), dan Tobin's Q, sedangkan variabel independennya menggunakan perusahaan peringkat 10 besar menurut *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diproksi dengan skor CGPI antara 1-100 yang telah diperingkat dari hasil penilaian penerapan GCG dalam perusahaan oleh IICG. Populasi yang akan menjadi obyek penelitian adalah perusahaan yang mengikuti survei oleh IICG tahun 2006-2010. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, sehingga diperoleh sampel sebanyak 45 perusahaan dari tahun 2006-2010. Data diuji menggunakan analisis regresi yaitu dengan mengukur besarnya pengaruh secara kuantitatif dan kualitatif dari perubahan variabel dependen atas dasar nilai variabel independen. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksi dengan NPM, ROA, ROE, EPS, dan Tobin's Q. Hal tersebut berarti semakin baik penerapan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan maka akan baik pula kinerja keuangan perusahaan.

Persamaan :

1. Variabel dependennya menggunakan kinerja keuangan;
2. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan (*annual report*);
3. Kinerja keuangan diproksi menggunakan *Return On asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE).

Perbedaan :

1. Penelitian terdahulu mengambil data laporan keuangan tahunan (*annual report*) tahun 2006-2010 sedangkan penelitian sekarang tahun 2008 -2013;
2. Kinerja keuangan perusahaannya diproksi dengan NPM, EPS, Tobin's Q, ROA dan ROE sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan proksi *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE); dan
3. Variabel independen penelitian terdahulu menggunakan perusahaan peringkat 10 besar menurut *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diproksi dengan skor CGPI antara 1-100 yang telah diperingkat dari hasil penilaian penerapan GCG dalam perusahaan oleh IICG sedangkan penelitian sekarang menggunakan sebelas faktor penilaian atau indikator yang sesuai dengan Surat Edaran kepada semua Bank Umum Konvensional di Indonesia No.15/15/DNDP pada tanggal 29 April 2013 yang ada pada penilaian sendiri (*self assessment*).

3. Dian Prasinta (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan. Variabel dependennya adalah kinerja keuangan dan variabel independen adalah *Corporate Governance*. Penerapan *Good Corporate Governance* diukur dengan skor CGPI, sedangkan kinerja keuangan diukur dengan *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE) dan *Tobin's Q*. Data diuji menggunakan metode analisis regresi sederhana. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang ikut serta dan memenuhi syarat dalam ajang *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) Awards pada tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian dan Jumlah populasinya sebanyak 47 perusahaan yang terdaftar di CGPI Awards 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* sehingga menghasilkan sampel sebanyak 31 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara *Good Corporate Governance* dengan *Return On Assets* (ROA), namun terdapat hubungan positif antara *Good Corporate Governance* dengan *Return On Equity* (ROE) dan tidak terdapat hubungan positif antara *Good Corporate Governance* dengan *tobin's Q*.

Persamaan :

1. Variabel dependennya adalah kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE);
2. Data diperoleh dari data sekunder berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI); dan

Perbedaan :

1. Variabel independen penelitian terdahulu menggunakan *Good Corporate Governance* dari perusahaan dengan menggunakan skor *Corporate Governance Perception Index* (CGPI), sedangkan penelitian sekarang menggunakan sebelas faktor penilaian atau indikator yang sesuai dengan Surat Edaran kepada semua Bank Umum Konvensional di Indonesia No.15/15/DNDP pada tanggal 29 April 2013 yang ada pada penilaian sendiri (*self assessment*);
2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan ikut dalam ajang *CGPI Awards* 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010, Mempublikasikan data laporan keuangan di *Indonesia Stock Exchange* (IDX) dan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD), sedangkan penelitian sekarang mengambil sampel data di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 – 2013; dan
3. Kinerja keuangan penelitian terdahulu diukur dengan *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE) dan *Tobin's Q*, sedangkan penelitian sekarang kinerja keuangannya diukur dengan *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE).

4. Okky Andriyan dan Supatmi (2010)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *Corporate Governance* (CG) terhadap kinerja keuangan perbankan dan penelitian ini ingin membuktikan bahwa kinerja keuangan perbankan dapat dipengaruhi oleh mekanisme CG-nya, bukan hanya sekedar pemenuhan ketentuan perbankan. Variabel dependennya adalah kinerja keuangan BPR, variabel independennya *Corporate Governance* yang terdiri dari

kepemilikan manajerial, proporsi *outside directors*, dan jumlah *board of directors*, serta variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan. Sampel penelitian diambil dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) swasta di Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan menetapkan kriteria tertentu, sehingga diketahui dari 199 Bank BPR swasta yang terdaftar dalam Direktori Perbankan Indonesia di wilayah propinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 hanya 141 Bank BPR swasta yang memenuhi persyaratan untuk menjadi sampel penelitian ini. Kinerja keuangan BPR diukur dengan rasio NPL, KPMM, LDR, dan ROA. Mekanisme CG diproksi dengan kepemilikan manajerial, proporsi *outside directors*, dan jumlah *board of directors* (BOD), dengan variabel kontrol ukuran BPR dan umur BPR. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik inferensia dengan menggunakan analisis regresi berganda, sehingga hasil penelitian menemukan bahwa mekanisme CG secara simultan berpengaruh terhadap rasio NPL, KPMM, dan ROA serta secara parsial, kepemilikan manajerial dan proporsi *outside directors* menunjukkan pengaruh negatif terhadap rasio NPL dan ROA, sedangkan jumlah BOD berpengaruh negatif terhadap rasio LDR.

Persamaan :

1. Data yang digunakan adalah data sekunder.

Perbedaan :

1. Penelitian terdahulu dilakukan hanya satu periode yaitu tahun 2010, sedangkan penelitian sekarang dilakukan selama enam tahun yaitu tahun 2008 -2013;
2. Data yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan BPR swasta tahun 2009 yang bersifat kuantitatif dan dipublikasikan dalam Direktori Perbankan yang diterbitkan oleh Bank Inonesia, sedangkan penelitian sekarang mengambil data sekunder dari

perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2008 -2013; dan

3. Penelitian sekarang menggunakan 2 variabel yaitu variabel dependennya adalah kinerja keuangan dan variabel independen menggunakan sebelas faktor penilaian atau indikator yang sesuai dengan Surat Edaran kepada semua Bank Umum Konvensional di Indonesia No.15/15/DNDP pada tanggal 29 April 2013 yang ada pada penilaian sendiri (*self assessment*), sedangkan penelitian terdahulu menggunakan 3 variabel yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel control. Variabel dependennya adalah kinerja keuangan BPR, variabel independennya *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan manajerial, proporsi *outside directors*, dan jumlah *board of directors*, serta variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan

5. Totok Dewayanto (2010)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lebih dalam pengukuran tata kelola dan kinerja perusahaan sektor perbankan yang ditentukan oleh mekanisme tata kelola perusahaan. Penelitian ini melibatkan variabel yang terdiri dari delapan variabel bebas (independen), satu variabel terikat (dependen) dan satu variabel control. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi kepemilikan pemegang saham pengendali, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris

independen, CAR, dan auditor eksternal. Variabel dependennya adalah kinerja perusahaan perbankan yang diukur oleh ROA, dan variabel kontrolnya adalah ukuran bank yang diproksikan dengan *natural logarithm asset*. Kumpulan datanya menggunakan *annual report* dari tahun 2006-2008, dan sampel yang digunakan sebanyak 22 perusahaan perbankan nasional. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Pengolahan data menggunakan alat bantu statistik regresi linear berganda dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS) Regression Model* atau yang dikenal dengan asumsi klasik. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap kinerja perbankan artinya tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal menunjukkan hubungan yang negatif signifikan terhadap kinerja perbankan kecuali hanya satu ukuran dewan direksi yang menunjukkan hubungan yang positif namun tidak signifikan. Mekanisme Pemantauan Regulator melalui persyaratan cadangan atau Rasio Kecukupan Modal (CAR) menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja perbankan dengan variabel kontrol ukuran bank yang diproksikan oleh total *assets*. Mekanisme pemantauan pengungkapan melalui auditor eksternal menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja perbankan.

Persamaan :

1. Variabel dependennya adalah kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Assets (ROA)*.

Perbedaan :

1. Penelitian terdahulu melibatkan tiga variabel yang terdiri dari delapan variabel bebas (independen) yang terdiri dari kepemilikan pemegang saham pengendali, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, CAR, dan auditor eksternal, satu variabel terikat (dependen) yaitu kinerja perusahaan dan satu variabel control yaitu ukuran bank. Penelitian sekarang melibatkan 2 variabel yang terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya adalah kinerja perusahaan dan variabel independennya menggunakan sebelas faktor penilaian atau indikator yang sesuai dengan Surat Edaran kepada semua Bank Umum Konvensional di Indonesia No.15/15/DNDP pada tanggal 29 April 2013 yang ada pada penilaian sendiri (*self assessment*);
2. Periode penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2006-2008 sedangkan periode penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2008 -2013;
3. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan perbankan (*annual report*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2006- 2008, *Jakarta Stock Exchange (JSX)*, atau dapat dilihat pada situs resminya yaitu www.idx.co.id, website Bank Indonesia serta *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)* periode 2006-2008. Penelitian sekarang menggunakan data yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2008 -2013; dan

4. Pengolahan data menggunakan alat bantu statistik regresi linear berganda dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS) Regression Model*, dan penelitian sekarang menggunakan *Statistical Package For Social Science (SPSS)* dengan analisis regresi sederhana.

2.2 Landasan Teori

Pada landasan teori ini akan menjelaskan beberapa teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan hipotesis serta analisisnya.

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi (*agency theory*) pertama kali dijelaskan oleh (Jensen dan Meckling, 1976) yang mendefinisikan adanya hubungan keagenan sebagai suatu kontrak yang terjadi antara satu atau lebih pemilik organisasi (*principal*) menggunakan orang lain atau pengelola organisasi (*agent*) dalam menjalankan bisnis operasionalnya. Teori keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan adanya benturan kepentingan antara pemilik organisasi (*Principal*) dan manajemen sebagai pengelola organisasi (*agent*).

Menurut (FGCI, 2002) dalam (Arafat, 2006:8) menjelaskan bahwa konsep *Good Corporate Governance* sejalan dengan *agency theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (*agent*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Mereka bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam manajemen perusahaan. Pemilik saham hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh

manajemen (*agent*) serta mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan.

Keterkaitan antara teori agensi (*agency theory*) dengan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan bahwa pemegang saham meminta manajemen untuk mengelola perusahaannya dengan tujuan manajemen selaku *agent* mampu meningkatkan nilai perusahaan dan harga pasar saham sehingga dapat memberikan imbal hasil (*return*) yang besar dalam bentuk dividen kepada pemilik organisasi atau pemegang saham (*Principal*). Manajemen sebagai pengelola organisasi juga ingin mendapatkan bonus di akhir tahun jika perusahaan memiliki laba yang besar. Manajemen terkadang melaporkan laba yang tidak sebenarnya. Manajemen sebagai *agent* tidak berani untuk mengungkapkan informasi yang tidak diharapkan oleh pemegang saham, sehingga terdapat kecenderungan untuk memanipulasi laporan keuangan tersebut. Agar pengelola organisasi (*agent*) bertindak sesuai keinginan pemilik organisasi (*principal*) maka pemilik organisasi (*principal*) akan mengeluarkan biaya untuk mengawasi kegiatan pengelola organisasi (*agent*). Adanya *Good Corporate Governance* dalam perusahaan sangat membantu pemilik perusahaan atau pemegang saham untuk percaya bahwa manajemen mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dengan sebenarnya.

2.2.2 *Good Corporate Governance*

Berdasarkan SK No KEP-117/M-MBU/2002 yang dikeluarkan oleh menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang penerapan praktek *Good*

Corporate Governance dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), disebutkan pasal 1 (satu) bahwa *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Menurut Jusuf Wanandi (1998) dalam (Heribertus, 2006:142) mengemukakan makna *Good Corporate Governance* sebagai kekuasaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, segala kebijakan yang diambil secara transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) kepada masyarakat.

Tujuan tata kelola menurut (FCGI, 2002:5) dalam (Hanggraeni, 2010:36-37) menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, sehingga tata kelola perusahaan dapat dipergunakan untuk menjelaskan peran dan perilaku direksi, dewan komisaris, dan para pemegang saham. Menurut (Alex, 2014) tujuan *Good Corporate Governance* adalah:

1. Mewujudkan praktek bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten;
2. Mewujudkan kemandirian dalam membuat keputusan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pimpinan dalam perusahaan tersebut;
3. Memaksimalkan *value* perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan akuntabilitas, dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan;
4. Memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional, transparan dan efisien; dan

5. Memastikan setiap pegawai dalam perusahaan berperan sesuai wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Dalam suatu *paper The Bassel Committee on Banking Supervision-Federal Reserve*, telah menyoroti fakta bahwa strategi dan teknik yang didasarkan pada prinsip-prinsip OECD (Brigham dan Erhardt, 2005) dalam (Dewayanto, 2010), yang merupakan dasar untuk melaksanakan tata kelola perusahaan meliputi:

1. Nilai-nilai perusahaan, kode etik dan perilaku lain yang sesuai standar dan sistem yang digunakan untuk memastikan kepatuhan mereka;
2. Pembentukan mekanisme untuk interaksi dan kerjasama di antara dewan direksi, manajemen senior, dan para auditor; dan
3. Sistem pengendalian internal yang kuat, termasuk fungsi-fungsi audit internal dan eksternal, manajemen risiko fungsi independen dari lini bisnis, dan *check and balance* lainnya.

Berdasarkan SK No KEP-117/M-MBU/2002 yang dikeluarkan oleh menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang penerapan praktek *Good Corporate Governance* dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), disebutkan pasal 3 disebutkan lima prinsip-prinsip yang mengatur *Good Corporate Governance* yaitu :

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;

- b. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- d. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan
- e. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut (Arafat, 2006:13), manfaat yang diperoleh perusahaan ketika perusahaan tersebut menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* meliputi :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*;
2. Meningkatkan *corporate value*, sebagaimana diungkapkan oleh Tjager et al. (2003), secara teoritik, praktik *Good Corporate Governance* meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri;

3. Meningkatkan kepercayaan investor. Para investor cenderung menghindari perusahaan yang buruk dalam penerapan *Good Corporate Governance* dan *Good Corporate Governance* dipandang sebagai kriteria kualitatif penentu; dan
4. Pemegang saham merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DNDP yang dikeluarkan pada 29 April 2013, prinsip dasar *Good Corporate Governance*, Bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi sebelas faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance*, yaitu :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris wajib dilaksanakan secara independen, wajib memastikan bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* dapat terselenggara dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, dan wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi. Pelaksanaan kebijakan strategis bank wajib untuk diarahkan, dipantau, dan dievaluasi oleh Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan bank. Dewan komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :

1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan; dan

2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank dan wajib mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi wajib dilaksanakan oleh direksi.

Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan wajib mengungkapkan kepada pegawai tentang kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. Kebijakan yang bersifat strategis dibidang kepegawaian antara lain kebijakan mengenai sistem perekrutan (*recruitment*), sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana bank untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan pegawai. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai.

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

Komite audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan

keuangan. Pemenuhan pelaksanaan tugas tersebut, komite audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
- b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
- c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
- d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite pemantau risiko paling kurang melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko, guna memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris.

4. Penanganan benturan kepentingan

Anggota dewan komisaris, anggota direksi dan pejabat eksekutif dilarang mengambil keputusan yang berpotensi merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank, bank harus memiliki dan menerapkan (*enforce*) kebijakan intern mengenai :

1. Pengaturan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai bank, antara lain tata cara pengambilan keputusan; dan
2. Administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan

kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.

5. Penerapan fungsi kepatuhan

Bank wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Bank wajib menunjuk seorang direktur kepatuhan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang penugasan direktur kepatuhan (*Compliance Director*) dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bagi Bank Umum. Pelaksanaan fungsi direktur kepatuhan dapat bekerja secara efektif apabila bank membentuk satuan kerja kepatuhan (*compliance unit*) yang independen terhadap satuan kerja operasional.

6. Penerapan fungsi audit intern

Pelaksanaan fungsi audit intern bekerja secara efektif jika bank membentuk satuan kerja audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional. Satuan kerja audit intern mempunyai kewajiban untuk menyusun dan memperbarui pedoman kerja, sistem, dan prosedur yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang penugasan direktur kepatuhan (*Compliance Director*) dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bagi Bank Umum.

7. Penerapan fungsi audit ekstern

Bank diwajibkan untuk menunjuk akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit laporan keuangan bank. Penunjukan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik terlebih dahulu wajib memperoleh persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris sesuai rekomendasi komite audit. Penunjukan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang transparansi kondisi keuangan bank.

8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank yang berpedoman pada persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum.

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)

Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyediaan dana dengan menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan untuk menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi pengurus bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait. Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar (*large exposures*) wajib berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang batas maksimum pemberian kredit Bank Umum.

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal

Bank wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *Stakeholders*. Bank wajib menyusun dan menyajikan laporan dengan tata

cara, jenis dan cakupan yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi kondisi keuangan bank dan bank wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dipastikan dengan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen.

11. Rencana strategik Bank.

Bank wajib menyusun rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi (*corporate plan*) dan rencana bisnis (*business plan*). Penyampaian rencana korporasi (*corporate plan*) dan perubahannya kepada Bank Indonesia berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum. Penyusunan dan penyampaian rencana bisnis (*business plan*) berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

2.2.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan menurut (Susanti dan Sudantoko, 2012) merupakan hasil analisis keuangan perusahaan yang dapat menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya saat ini untuk menentukan keputusan di masa yang akan datang. Menurut (Kashmir, 2011:47) kinerja keuangan perusahaan diukur menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan sangat penting dalam melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan (Harahap, 2007:297).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP yang diterbitkan pada 14 Desember 2001 sebagai pembaharuan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.13/30/DNDP yang diterbitkan pada 16 Desember 2011 disebutkan bahwa sebelas rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perbankan yaitu :

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
2. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif bermasalah
3. Rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif
4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif
5. NPL gross
6. NPL net
7. ROA (*Return On Assets*)
8. ROE (*Return On Equity*)
9. NIM (*Net Interest Margin*)
10. BOPO (Beban Operasi Terhadap Pendapatan Operasi)
11. LDR (*Loan to deposit ratio*)

Dalam penelitian ini, peneliti memilih dua rasio untuk mengukur kinerja keuangan yaitu *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing rasio yang digunakan dalam penelitian ini :

1. *Return On Assets* (ROA)

Menurut (Sutojo, 1997:57) *Return On Assets* (ROA) merupakan gambaran tentang kemampuan pimpinan bank mengoperasikan harta bank yang

dipercayakan kepada mereka untuk mencari keuntungan. Rasio profitabilitas ini sekaligus memberikan efisiensi kerja bank yang bersangkutan.

Menurut (Harahap, 2007:305) mengatakan bahwa semakin besar *Return On Assets* (ROA) maka akan semakin baik, hal ini berarti bahwa aset dapat lebih cepat berputar dan meraih laba. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung *Return On Assets* (ROA) berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DNDP tanggal 16 Desember 2011:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata total aset}}$$

2. *Return On Equity* (ROE)

Menurut (Sutojo, 1997:57) *Return On Equity* (ROE) merupakan tolok ukur profitabilitas yang paling penting bagi pemegang saham. *Return On Equity* (ROE) memberikan gambaran tentang seberapa besar bank telah mampu menghasilkan keuntungan dari jumlah dana yang telah mereka investasikan dalam bank tersebut.

Apabila sebuah bank memiliki presentase *Return On Assets* (ROA) yang rendah, namun *Return On Equity* (ROE) yang tinggi, maka kondisi profitabilitas seperti ini dirasakan kurang sehat. Menurut perbankan internasional disebut sebagai “*heavily leveraged*”, yaitu jumlah harta neto tersebut dinyatakan mereka terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah seluruh harta bank. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung *Return On Equity* (ROE) berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DNDP tanggal 16 Desember 2011:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Rata-rata ekuitas}}$$

2.3 Pengaruh Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Return On Assets (ROA)*

Return On Assets (ROA) merupakan gambaran tentang manajemen perusahaan dalam mengoperasikan aset perusahaan untuk mencari laba atau keuntungan. *Return On Asset (ROA)* yang bernilai positif menunjukkan bahwa aset yang digunakan mampu memberikan keuntungan untuk perusahaan, sebaliknya *Return On Asset (ROA)* yang bernilai negatif menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian akibat dari manajemen perusahaan yang kurang mampu mencari tingkat pengembalian asetnya. Artinya, semakin baik predikat komposit perusahaan menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* perusahaan juga semakin baik sehingga akan meningkatkan nilai *Return On Assets (ROA)* dan bisa dilihat dari nilai *Return On Assets (ROA)* yang menunjukkan angka nilai positif, sebaliknya jika predikat komposit dinilai tidak baik menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* perusahaan juga tidak baik yang bisa dilihat dari nilai *Return On Assets (ROA)* yang menunjukkan angka negatif.

Susanti dan Sudantoko (2012) meneliti pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksi menggunakan *Return On Assets (ROA)*. Hal ini berarti semakin tinggi penerapan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan akan diikuti pula dengan peningkatan nilai *Return On Assets (ROA)* yang tinggi dalam

perusahaan.

Prasinta (2012) meneliti pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksi menggunakan *Return On Assets* (ROA). Hal ini disebabkan karena *Return On Assets* (ROA) menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Jangka waktu *Good Corporate Governance* bersifat jangka panjang sehingga tidak dapat diukur kesuksesannya dalam waktu yang singkat, sedangkan *Return On Assets* (ROA) lebih bersifat jangka pendek dimana hasil yang dicapai dapat berlangsung dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi perusahaan.

2.3.2 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity (ROE) merupakan tolok ukur yang penting bagi pemegang saham. *Return On Equity* (ROE) menggambarkan seberapa besar bank mampu memperoleh keuntungan dari dana yang diinvestasikan kedalam bank tersebut. Nilai *Return On Equity* (ROE) yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham dan menunjukkan pertumbuhan perusahaan kedepannya, sehingga *Return On Equity* (ROE) yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan juga baik, sehingga investor tertarik menanamkan modal. Nilai *Return On Equity* (ROE) yang rendah menunjukkan kondisi kinerja keuangan perusahaan yang tidak baik, sehingga investor kurang tertarik untuk menanamkan modal pada perusahaan yang bersangkutan. Apabila pelaksanaan *good corporate governance* yang berjalan

secara efektif dan efisien maka seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik yang juga akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Nofiani dan Nurmayati (2010) meneliti pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance* perusahaan yang baik, maka tingkat pengembalian investasi bagi pemegang saham atau kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memperoleh laba juga akan meningkat. Akibatnya, akan banyak investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.

Prasinta (2012) meneliti pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksi menggunakan *Return On Equity* (ROE). Hal ini disebabkan karena *Good Corporate Governance* yang tinggi membuat kepercayaan *stakeholders* meningkat, dengan demikian modal menjadi tidak terlalu tinggi sehingga *Return On Equity* (ROE) cenderung meningkat. Semakin tinggi *Good Corporate Governance*, maka semakin tinggi pula tingkat ketaatan sehingga menarik investor yang berakibat meningkatnya kinerja keuangan.

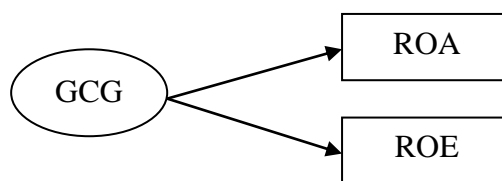
2.4

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara variabel Independen yaitu *Good Corporate*

Governance dan variabel dependen yaitu *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE).

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Ada Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Return On Asset* (ROA)

H₂ : Ada Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Return On Equity* (ROE)